

ABSTRAK

Pemilihan Presiden 2024 menjadi momentum penting dalam dinamika politik Indonesia, dimana keterlibatan dan sikap organisasi masyarakat (ormas), turut menjadi sorotan publik. Sikap Netralitas Politik menjadi alasan utama pemilihan tema ini karena Netralitas merupakan prinsip dasar yang dipegang teguh Muhammadiyah dalam menjaga independensi organisasi dari pengaruh politik praktis, sekaligus mencerminkan komitmen etis terhadap demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Pemilihan fokus wilayah kota Palembang dilatarbelakangi oleh posisi strategis kota ini sebagai salah satu pusat aktivitas Muhammadiyah di Sumatera Selatan, dengan jumlah kader, amal usaha, dan pengaruh sosial yang besar, selain itu dinamika politik lokal yang cukup kompleks menjadikan Palembang sebagai wilayah yang relevan untuk menguji sejauh mana prinsip netralitas tersebut dijaga dan dijalankan oleh struktur Muhammadiyah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan faktor-faktor yang melatarbelakangi netralitas politik Muhammadiyah, khususnya di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Palembang. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengkaji dokumen organisasi, teori netralitas politik, serta wawancara dengan tokoh Muhammadiyah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa netralitas Muhammadiyah bersifat ideologis, historis, dan konstitusional. Sikap ini merupakan bagian dari strategi moral organisasi untuk menjaga integritas, independensi, dan keberlangsungan dakwah di tengah dinamika politik yang terus berubah. Bentuk netralitas tersebut tercermin dalam ketidakterlibatan organisasi secara langsung dalam politik praktis, pemberian kebebasan politik kepada anggota, serta partisipasi aktif dalam pendidikan politik dan penguatan demokrasi.

Kata kunci: Muhammadiyah, Netralitas Politik, Pemilu 2024, PDM Palembang, Organisasi Sosial Keagamaan

ABSTRACT

The 2024 Presidential Election is an important momentum in the dynamics of Indonesian politics, where the involvement and attitudes of community organizations (ormas) are also in the public spotlight. The attitude of Political Neutrality is the main reason for choosing this theme because Neutrality is a basic principle that Muhammadiyah holds firmly in maintaining organizational independence from practical political influences, while reflecting an ethical commitment to a healthy and sustainable democracy. The choice of the focus area of Palembang City is motivated by the strategic position of this city as one of the centers of Muhammadiyah activities in South Sumatra, with a large number of cadres, charitable works, and social influence, in addition to the fairly complex local political dynamics that make Palembang a relevant area to test the extent to which the principle of neutrality is maintained and implemented by the Muhammadiyah structure. This study aims to analyze the forms and factors behind Muhammadiyah's political neutrality, especially in the Muhammadiyah Regional Leadership (PDM) of Palembang City. The approach used is descriptive qualitative by reviewing organizational documents, political neutrality theories, and interviews with local Muhammadiyah figures. The research results show that Muhammadiyah's neutrality is ideological, historical, and constitutional. This stance is part of the organization's moral strategy to maintain the integrity, independence, and continuity of its da'wah (Islamic outreach) amidst constantly changing political dynamics. This neutrality is reflected in the organization's non-direct involvement in practical politics, granting political freedom to its members, and active participation in political education and strengthening democracy.

Keywords: Muhammadiyah, Political Neutrality, 2024 Election, PDM Palembang.